

KATALOG: 3205026.65

RINGKASAN EKSEKUTIF

**KEMISKINAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

2023

Volume 4, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

KEMISKINAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2023

Volume 4, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2023**

Volume 4, 2024

ISBN: –

Katalog: 3205026.65

Nomor Publikasi: 65000.24027

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,71 cm

Jumlah Halaman: xi+25 halaman

Penyusun Naskah:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Penyunting:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pembuat Kover:

BPS Provinsi Kalimantan Utara

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Ilustrasi :

Antara Foto

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN
RINGKASAN EKSEKUTIF
KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2023
Volume, 2024**

Pengarah:

Mas'ud Rifai, SST., M.M

Penanggung Jawab:

Basran, SE

Penyunting:

Fitri Puspitasari, SST

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Fadlilah Rahmawati, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Fitri Puspitasari, SST

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh negara–negara berkembang di dunia. Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan antara lain tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara 2023 Volume 4 merupakan ringkasan eksekutif yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Ringkasan eksekutif ini memuat data/informasi kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Maret 2023, yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Data yang disajikan dalam ringkasan eksekutif ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Disadari bahwa ringkasan eksekutif ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Ringkasan eksekutif ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta.

Kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyusunan dan penerbitan ringkasan eksekutif ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak–banyaknya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan ringkasan eksekutif ini di masa mendatang sangat kami harapkan. Semoga ringkasan eksekutif ini bermanfaat.

Tanjung Selor, Juni 2024

**Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Utara**



Mas'ud Rifai, SST., M.M

DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
KEMISKINAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2023
Volume, 2024

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	3
II. Tujuan.....	4
III. Ruang Lingkup.....	4
V. Sumber data	4
VI. Konsep dan Definisi.....	4
BAB 2 ULASAN	9
I. Perkembangan Indikator kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	11
II. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (PO) Provinsi Kalimantan Utara.....	13
III. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Utara.....	16
IV. Karakteristik Penduduk Miskin	17
BAB 3 KESIMPULAN	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Perkembangan Indikator Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2022 dan Maret 2023 11
Tabel 2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Utara, 2023..... 18
Tabel 3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Pekerjaan Utara di Provinsi Kalimantan Utara, 2023 19
Tabel 4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara, 2023 20
Tabel 5	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Komoditas Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Kalimantan Utara, 2023..... 21
Tabel 6	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/ Bersama di Provinsi Kalimantan Utara, 2023 22

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara (Rp/Kapita/Bulan), Maret 2020–Maret 2023	12
Gambar 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (PO) di Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2020–Maret 2023.....	13
Gambar 3 Persentase Penduduk Miskin (PO) Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Provinsi-Provinsi di Indonesia, Maret 2023	15
Gambar 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2020 – Maret 2023	16

<https://kaltara.bps.go.id>



BAB 1

Pendahuluan

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang selalu dihadapi oleh hampir semua wilayah di Indonesia, yang menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Pengentasan kemiskinan menjadi target utama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang tertuang pada tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.

Pengukuran kemiskinan yang akurat dan dapat dipercaya merupakan instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976 –1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Penghitungan tingkat kemiskinan telah melalui proses yang cukup panjang hingga dapat disajikan setiap tahunnya. Sejak tahun 2011, BPS menghitung tingkat kemiskinan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September untuk tingkat nasional dan provinsi berdasarkan hasil Susenas Maret dan September. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, penghitungan tingkat kemiskinan hanya dilakukan sekali dalam setahun berdasarkan

hasil Susenas Maret.

Data kemiskinan yang disajikan BPS yang bersumber dari data Susenas tersebut merupakan data kemiskinan makro, artinya data kemiskinan yang hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi hasil survei. Kemiskinan makro, tidak dapat menunjukkan “siapa” dan “dimana” penduduk miskin.

II. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi ringkasan eksekutif ini adalah untuk menyajikan kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret dan September 2022 dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

III. Ruang Lingkup

Publikasi ringkasan eksekutif ini menyajikan data dan informasi kemiskinan yang meliputi:

1. Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara
2. Jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara
3. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara
4. Kualitas kemiskinan yang ditunjukkan melalui indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2)

V. Sumber data

Sumber data utama yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan adalah data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

VI. Konsep dan Definisi

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).
4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
5. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan
6. *Head Count Index* (HCI-PO) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan.
8. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk

miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

9. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota adalah data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September. Jumlah sampel Provinsi Kalimantan Utara pada Susenas Maret 2023 sebanyak 2.730 rumah tangga yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Sejak tahun 2015 terjadi pergeseran sampel besar dari Susenas September ke Susenas Maret, sehingga hasil Susenas Maret (termasuk angka kemiskinan) dapat mewakili sampai level kabupaten/ kota, sedangkan Susenas September hanya sampai level provinsi. Khusus tahun 2023, angka kemiskinan yang dirilis hanya angka kemiskinan hasil Susenas Maret 2023.
11. Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas.
12. Bekerja adalah kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama 1 jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.
13. Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.
14. Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan + non makanan).
15. Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber utama air minum dan air yang tidak sustan (air hujan), airt terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/ cuci/ dan lain-lain yang digunakan berasal dari air terlindung.
16. Rumah tangga pengguna jamban sendiri/ bersama

adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

17. Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra) adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras sejahtera (Rastra). Program Rastra (sebelumnya disebut program Beras Miskin/ Raskin) adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.
18. Rumah Tangga Miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial pangan BPNT yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. Bahan pangan dalam program BPNT ini adalah beras dan/ atau telur.



BAB 2
Alasan

BAB 2. ULASAN

I. Perkembangan Indikator kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2035, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 730,01 ribu jiwa yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota dengan kondisi ekonomi masing-masing penduduknya yang beragam.

Tabel 1 Perkembangan Indikator Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2022 dan Maret 2023

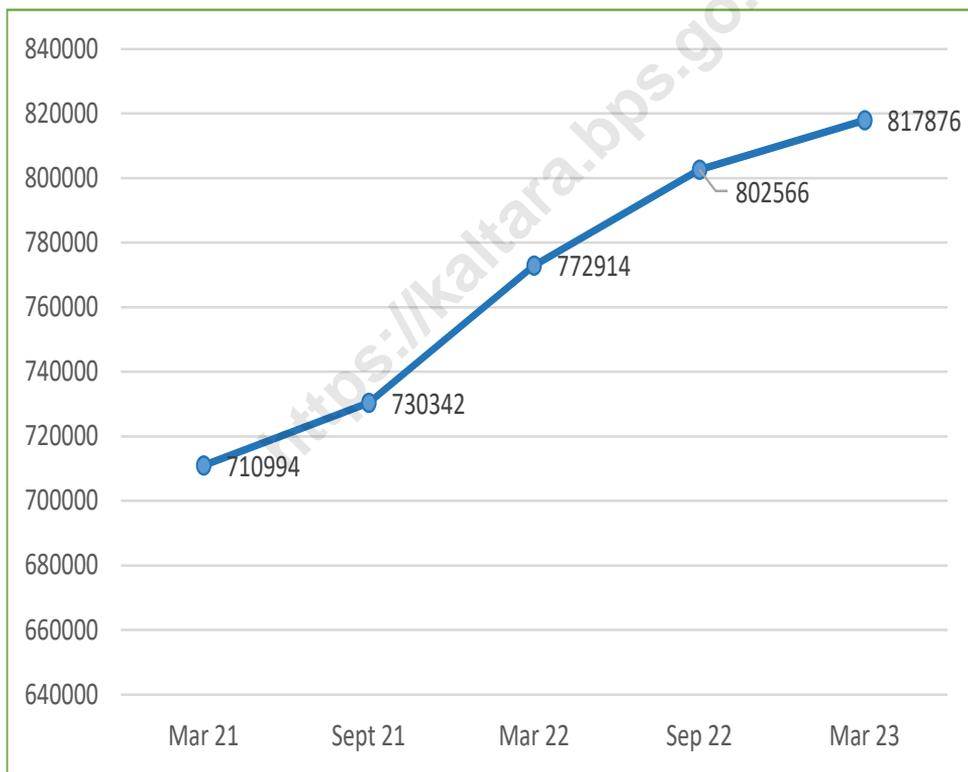
Indikator Kemiskinan	Bulan/Tahun	
	Sept 2022	Maret 2023
(1)	(2)	(3)
Garis Kemiskinan (RP/ Kapita/ Bulan)	802.566	817.876
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	50,58	47,97
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,86	6,45
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,603	0,639
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,098	0,107

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Pada Maret 2023, Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Kalimantan Utara mencapai 817.876 rupiah/kapita/bulan. Terjadi kenaikan sebesar 1,91 persen bila dibandingkan dengan Garis Kemiskinan September 2022. Kenaikan angka Garis Kemiskinan ini

menunjukkan bahwa standar penduduk Provinsi Kalimantan Utara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari agar tidak menjadi miskin semakin meningkat dari Bulan September 2022 ke Maret 2023.

Dari gambar 1 di bawah ini, dapat dilihat bahwa dalam periode tiga tahun terakhir (2021–2023), Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami kenaikan yaitu dari 710.994 rupiah/kapita/bulan pada Maret 2021 menjadi 817.876 rupiah/kapita/bulan pada Maret 2023.

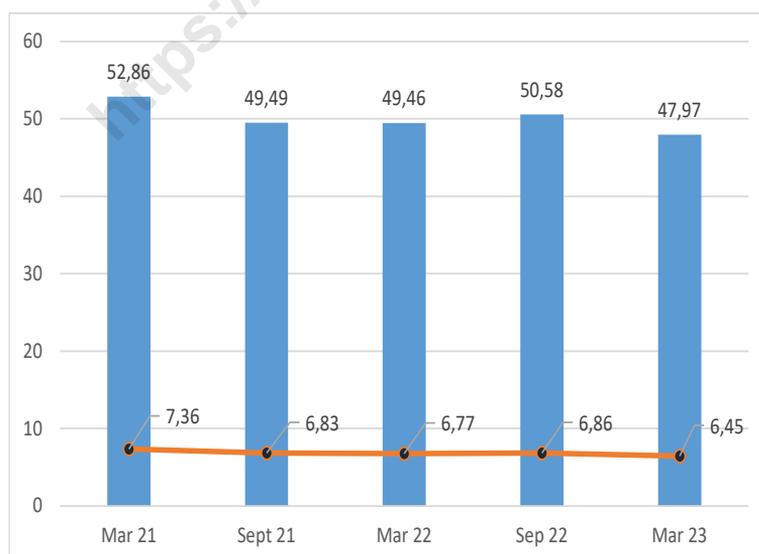


Gambar 1 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara (Rp/Kapita/Bulan), Maret 2021–Maret 2023

Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Maret 2023 berada jauh cukup signifikan di atas Garis Kemiskinan Nasional yaitu sebesar 817.876 Rupiah/Kapita/Bulan.

II. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (PO) Provinsi Kalimantan Utara

Pada Maret 2023, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 47,97 ribu jiwa, sedangkan pada September 2022, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 50,58 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sejumlah 2,26 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2023 mencapai 6,45 persen, sedangkan pada September 2022 mencapai 6,86 persen. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,41 persen poin jika dibandingkan antara September 2022 dan Maret 2023.

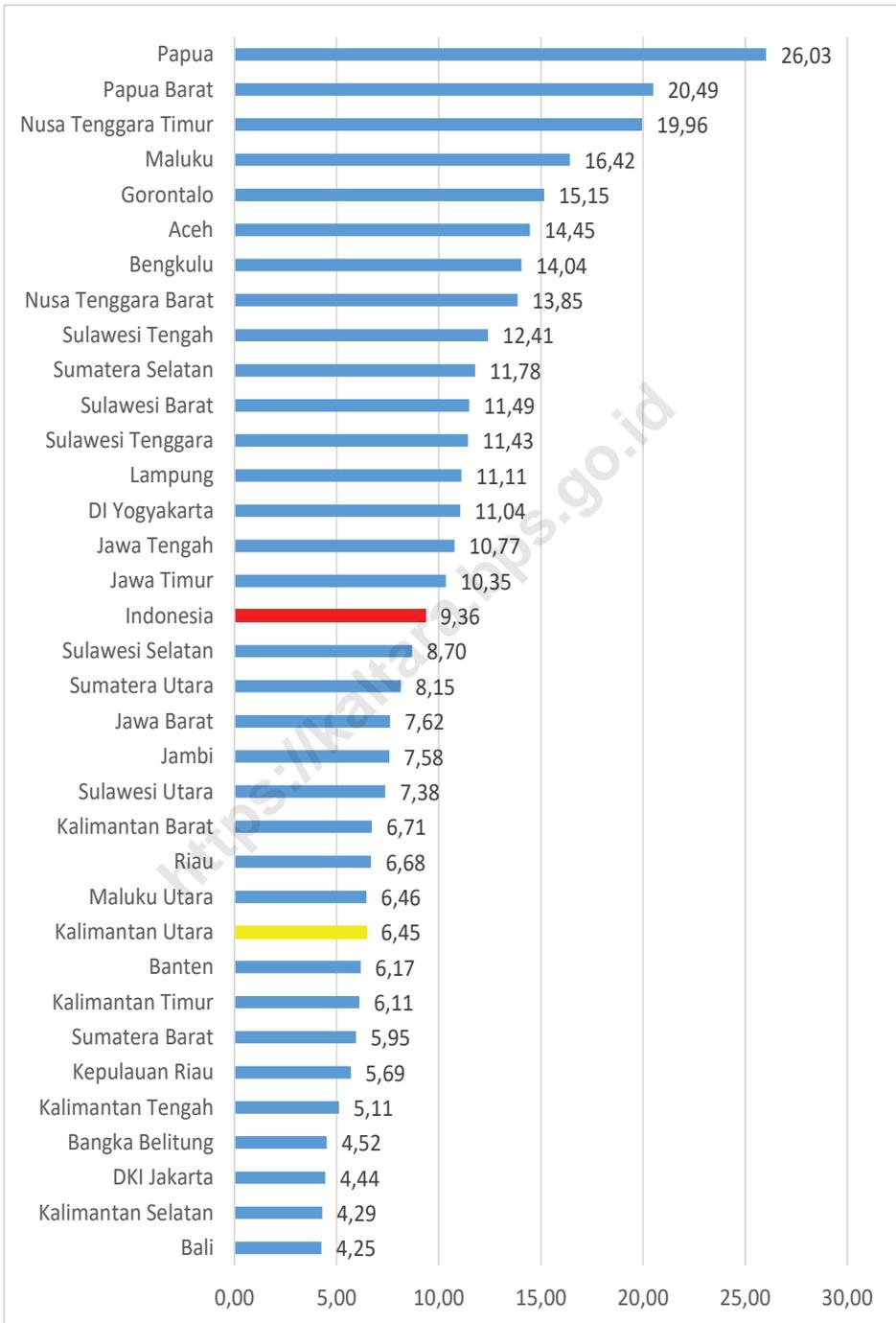


Gambar 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (PO) di Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2021–Maret 2023

Selama tiga tahun terakhir, mulai dari Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara bergerak secara fluktuatif. Pada Maret 2021 hingga September 2021, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan. Penduduk miskin yang semula berjumlah 52,86 ribu jiwa pada Maret 2021 turun menjadi 49,49 ribu jiwa pada September 2021. Penurunan penduduk miskin yang terjadi pada Maret 2021 hingga September 2021 mencapai 3,37 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin juga terjadi pada Maret 2021 hingga Maret 2022, yang semula 52,86 ribu pada September 2021 turun menjadi 49,46 ribu pada Maret 2022. Sehingga pada Maret 2021 hingga Maret 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,40 ribu.

Penduduk miskin mengalami kenaikan pada Maret 2022 hingga September 2022. Pada Maret 2022, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 49,46 ribu jiwa (6,77 persen). Terjadi kenaikan penduduk miskin sejumlah 1,12 ribu jiwa pada September 2022 jika dibandingkan antara penduduk miskin pada Maret 2022 atau kenaikan sebesar 2,21 persen poin. Selanjutnya terjadi penurunan penduduk miskin pada bulan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2023 sebesar 47,97 ribu jiwa, angka ini menurun sebesar 2,61 ribu jika dibandingkan September 2022.

Secara nasional, persentase penduduk miskin Maret 2023 di Provinsi Kalimantan Utara menempati peringkat ke-10 dengan persentase penduduk miskin terkecil bila dibandingkan dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada



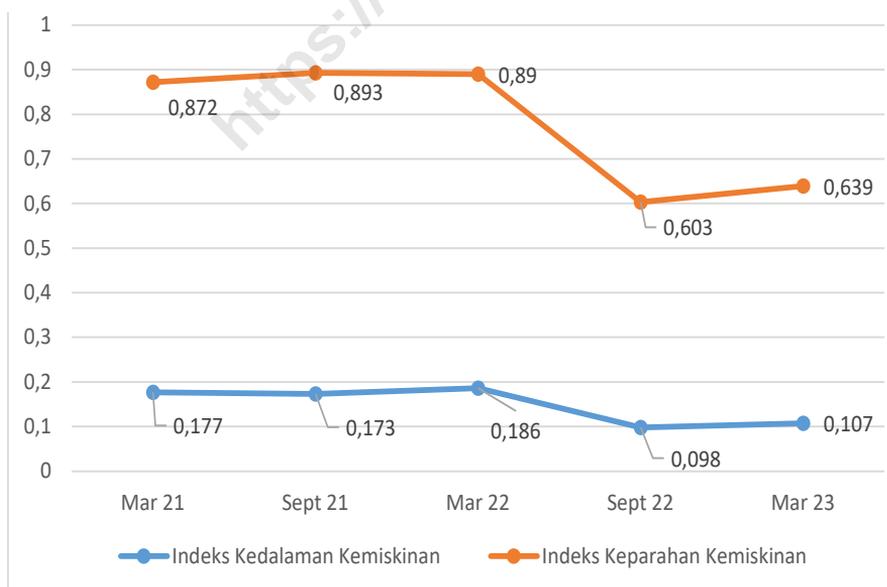
Gambar 3 Persentase Penduduk Miskin (PO) Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Provinsi-Provinsi di Indonesia, Maret 2023

III. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Utara

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga seharusnya dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 0,693 atau mengalami kenaikan dari September 2022 sebesar 0,09 poin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan di Provinsi Kalimantan Utara dari 0,098 pada September 2022 menjadi 0,107 pada September 2022 (kenaikan sebesar 0,009 poin).



Gambar 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Utara, Maret 2020 – Maret 2023

Selama periode Maret 2021 hingga Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kalimantan Utara bergerak cukup fluktuatif, terutama dari Maret 2022 ke September 2022 yang mengalami penurunan yang tajam. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa pada tahun yang mengalami penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara semakin mendekati Garis Kemiskinan. Selama Maret 2021 hingga Maret 2023, nilai P1 terendah terjadi pada September 2022 yaitu sebesar 0,603, yang dapat diartikan bahwa selama periode Maret 2021 hingga Maret 2023, peluang terbesar penduduk miskin untuk keluar dari Garis Kemiskinan terjadi pada September 2022.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami pergerakan yang fluktuatif dari Maret 2021 hingga Maret 2023. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada periode tertentu mengalami penyempitan dan pada periode tertentu mengalami perluasan. Nilai P2 terendah terjadi pada September 2022 yaitu sebesar 0,098. Hal ini menunjukkan bahwa selama Maret 2020 hingga September 2022, tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri paling merata terjadi pada September 2022.

IV. Karakteristik Penduduk Miskin

Dengan melihat karakteristik penduduk miskin, maka hal ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih fokus dalam penentuan program pengentasan kemiskinan, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Persentase (%)
(1)	(2)
Tidak Tamat SD	15,79
Tamat SD/ SLTP	64,48
Tamat SLTA ke Atas	19,72

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Tingkat pendidikan berperan dalam memengaruhi angka kemiskinan. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang lebih rendah untuk menjadi miskin. Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara yang berusia 15 tahun ke atas didominasi oleh mereka yang berpendidikan tamat SD atau tamat SLTP yaitu sebanyak 64,48 persen pada tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para penentu kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan bahwa program pengentasan kemiskinan bagi penduduk miskin dengan pendidikan tamat SD atau tamat SLTP dapat menjadi prioritas utama di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas dan Status Pekerjaan Utara di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Status Pekerjaan Utama	Persentase (%)
(1)	(2)
Tidak Bekerja	44,82
Bekerja di Sektor Informal	37,20
Bekerja di Sektor Formal	17,98

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Ditinjau dari status pekerjaan utama, pada sebagian besar penduduk miskin berstatus sebagai pekerja informal. Pekerja informal merupakan penduduk yang status/ kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/ tidak dibayar. Sedangkan pekerja formal merupakan penduduk yang status/ kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/ buruh dibayar atau buruh/ karyawan/ pegawai.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, lebih dari sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 44,38 persen adalah tidak bekerja, kemudian yang bekerja di sektor informal sebesar 37,20 persen dan bekerja di sektor formal sebesar 17,98 persen.

Karakteristik ketenagakerjaan lainnya yang dapat ditunjukkan di antara penduduk miskin adalah lapangan pekerjaan atau sektor sumber penghasilan rumah tangga. Dilihat dari lapangan pekerjaan atau sektor sumber penghasilan rumah tangga, 27,59 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin sering kali masih melekat dengan mereka yang

bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani, dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan.

Tabel 4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Lapangan Pekerjaan	Persentase (%)
(1)	(2)
Tidak Bekerja	44,82
Bekerja di Sektor Pertanian	27,59
Bekerja di Sektor Non-Pertanian	27,58

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah hampir sebagian besar, yaitu sebanyak 44,82 persen pada tahun 2023 penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki pekerjaan. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan terkait penyediaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Bila dikaitkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka lapangan pekerjaan yang perlu disediakan adalah lapangan pekerjaan bagi penduduk miskin dengan pendidikan tamat SD atau tamat SLTP.

Tabel 5 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Komoditas Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Status Miskin	Persentase (%)
(1)	(2)
Miskin	53,58
Tidak Miskin	48,14
Miskin + Tidak Miskin	48,3

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan suatu rumah tangga. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut kelompok komoditasnya, yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara adalah untuk membiayai komoditi makanan pada tahun 2022. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara untuk komoditi makanan sebesar 53,58 persen pada tahun 2022. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penduduk yang tidak masuk ke dalam garis kemiskinan. Persentase pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang tidak miskin untuk makanan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 48,14 persen pada tahun 2022.

Tabel 6 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Status Penggunaan Air dan Jamban	Persentase (%)
(1)	(2)
Penggunaan Air Layak	79,17
Penggunaan Jamban Sendiri/ Bersama	88,29

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

Air layak yang dapat diakses oleh penduduk miskin menjadi salah satu fasilitas rumah sehat yang perlu diperhatikan. Asupan air yang cukup untuk tubuh sangat diperlukan untuk kesehatan. Setiap harinya air layak juga dibutuhkan untuk memasak, mandi, mencuci, dan dapat digunakan untuk bahan baku kebutuhan lainnya.

Pada tahun 2023, sebanyak 79,17 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan air layak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara telah mendapatkan akses air layak untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama, jamban komunal, jamban umum, dan tidak ada jamban. Pada tahun 2023, 88,29 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan jamban sendiri/ bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara telah menggunakan jamban sendiri/ bersama.



BAB 3

Kesimpulan

BAB III. KESIMPULAN

Selama periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara bergerak fluktuatif. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada Maret 2021 hingga Maret 2023. Lalu mulai Maret 2021, mulai terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara hingga Maret 2022 dan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin kembali pada Maret 2022 hingga September 2022, kemudian turun pada Maret 2023.

Dilihat dari karakteristiknya, penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh mereka yang berpendidikan tamat SD atau tamat SLTP. Selain itu, sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal, dan bekerja di sektor pertanian.

Lebih dari sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki pekerjaan (44,82 persen). Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait penyediaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu bentuk program pengentasan kemiskinan, dengan sasaran lapangan pekerjaan utama untuk penduduk miskin yang memiliki pendidikan tamat SD atau tamat SLTP.

Dilihat dari indikator rumah sehat, 79,17 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan air layak dan 88,29 persen penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menggunakan jamban sendiri/ bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin telah mendapatkan akses air layak dan telah menggunakan jamban sendiri/ bersama.

ST2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jl. H. Masykur RT 19, Tanjung Selor Hilir, Bulungan, 77212

Telp. (0552) 2033254; e-mail: bps8500@bps.go.id

Homepage: <https://kaltara.bps.go.id>